



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

**PAINAN, AGUSTUS
2025**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan urusan pertanian tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Perubahan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga Perubahan Renja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH....	65
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	77
3.3 Program dan Kegiatan.....	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	99
4.1 Perubahan Renja Tahun 2025.....	99
4.2 Pendanaan Perangkat daerah, Sumber	

	Dana/Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan.....	99
BAB V	PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Per Triwulan I Tahun 2025).....	7
Tabel 2.2 (T-C.29)	: Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	12
Tabel 2.3	: Target Kinerja Indikator 1.....	23
Tabel 2.4	: Target Kinerja Indikator 2.....	23
Tabel 2.5	: Target Kinerja Indikator 3.....	24
Tabel 2.6 (T-C.30)	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	24
Tabel 2.7	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
Tabel 2.8 (T-C.31)	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	50
Tabel 2.9 (T-C.32)	: Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	64
Tabel 3.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....	66
Tabel 3.2	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029.....	68
Tabel 3.3	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan	

		Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	69
Tabel 3.4	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	74
Tabel 3.5	:	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..	76
Tabel 3.6	:	Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	78
Tabel 3.7 (T-C.33)	:	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.....	85
Tabel 4.1 (T-C.27)	:	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	99

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perubahan rencana kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan Renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Renja perangkat daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja perangkat daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan perubahan Renja perangkat daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi perangkat daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah triwulan I tahun berjalan. Tahapan penetapan perubahan Renja perangkat daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya perubahan Renja perangkat daerah dijadikan pedoman

bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

Penyesuaian yang akan dilakukan meliputi:

- a) Penyesuaian indikator program/kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029;
- b) Perubahan anggaran pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan;
- c) Penambahan sub kegiatan baru untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 berpedoman pada:

- a) Rancangan perubahan RKPD; dan
- b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
- f) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- j) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; dan
- n) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah:

a) Maksud

Maksud disusunnya perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD tahun 2025 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

b) Tujuan

Penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 bertujuan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah serta sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja anggaran perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
 - 3.2.1. Tujuan
 - 3.2.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
 - 3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
 - 3.3.3. Penjelasan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
 - 3.3.4. Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Bagian (Perumusan Program dan Kegiatan)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Perubahan Renja Tahun 2025
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana/ Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan capaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan I tahun 2025 mencapai 19,69% (Rp.4.398.619.152) dari total anggaran sebesar Rp.22.338.827.646 dan fisik sebesar 21,34%. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat realisasi anggaran dan fisik kegiatan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
(Per Triwulan I Tahun 2025)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Ket
			(Rp.)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DINAS PERTANIAN	22.338.827.646	4.398.619.152	19,69	21,34	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.281.449.542	4.389.688.152	24,01	25,23	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	426.214.200	98.123.800	23,02	30,10	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.188.750	7.155.000	22,94	30,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31.188.750	7.155.000	22,94	30,00	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.489.000	-	-	10,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.489.000	-	-	10,00	
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.489.000	-	-	10,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.489.000	-	-	10,00	
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.894.950	4.794.000	97,94	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.894.950	4.794.000	97,94	100,00	
	5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.152.500	86.174.800	22,97	30,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	375.152.500	86.174.800	22,97	30,00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.680.867.945	4.071.049.319	24,41	25,02	
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.017.029.695	3.929.811.669	24,54	25,00	
	a. Belanja Pegawai	16.017.029.695	3.929.811.669	24,54	25,00	
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	659.720.000	137.160.000	20,79	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	659.720.000	137.160.000	20,79	25,00	
	8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.118.250	4.077.650	99,01	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.118.250	4.077.650	99,01	100,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Ket
		Sebelum Pergeseran	(3)	(Rp.)	%		
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.993.925	20.330.300	40,67	50,00		
9	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.993.925	20.330.300	40,67	50,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	49.993.925	20.330.300	40,67	50,00		
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.049.812	880.000	5,85	13,26		
10	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.913.200	880.000	17,91	20,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.913.200	880.000	17,91	20,00		
11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.136.612	-	-	10,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	10.136.612	-	-	10,00		
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.313.844	58.341.600	23,98	30,70		
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.397.834	-	-	12,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	11.397.834	-	-	12,00		
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.952.680	19.998.000	57,21	60,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	34.952.680	19.998.000	57,21	60,00		
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.203.480	-	-	15,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.203.480	-	-	15,00		
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	360.000	6,67	25,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	360.000	6,67	25,00		
16	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.850.000	-	-	12,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	14.850.000	-	-	12,00		
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.445.000	37.983.600	25,08	30,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	151.445.000	37.983.600	25,08	30,00		
18	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.064.850	-	-	15,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	10.064.850	-	-	15,00		
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.262.500	-	-	12,00		
19	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.262.500	-	-	12,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	42.262.500	-	-	12,00		
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.607.316	135.886.898	20,32	25,00		
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	160.700.000	27.516.898	17,12	25,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	160.700.000	27.516.898	17,12	25,00		
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.907.316	108.370.000	21,34	25,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	507.907.316	108.370.000	21,34	25,00		
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.140.000	5.076.235	3,27	23,50		
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.000	-	-	25,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	40.690.000	-	-	25,00		
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.200.000	3.051.235	3,35	25,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	91.200.000	3.051.235	3,35	25,00		
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.250.000	2.025.000	8,71	15,00		
	a. Belanja barang dan Jasa	23.250.000	2.025.000	8,71	15,00		
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	60.000.000	4.671.000	7,79	17,50		
9	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	4.671.000	15,57	20,00		
25	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	30.000.000	4.671.000	15,57	20,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	4.671.000	15,57	20,00		
10	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	-	-	15,00		
26	Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	-	-	15,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	15,00		
C.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	647.727.800	-	-	15,00		
11	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	647.727.800	-	-	15,00		
27	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	647.727.800	-	-	15,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	647.727.800	-	-	15,00		
D.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	26.342.410	515.000	1,96	12,00		
12	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.342.410	515.000	1,96	12,00		
28	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.342.410	515.000	1,96	12,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.342.410	515.000	1,96	12,00		
E.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	65.183.726	-	-	12,00		
13	Kegiatan Perizinan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.183.726	-	-	12,00		
29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	65.183.726	-	-	12,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.183.726	-	-	12,00		
F.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.258.124.168	3.745.000	0,11	1,19		
14	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.258.124.168	3.745.000	0,11	1,19		
30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	71.600.200	-	-	15,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	71.600.200	-	-	15,00		
31	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	186.523.968	3.745.000	2,01	15,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	186.523.968	3.745.000	2,01	15,00		
32	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.000.000.000	-	-	-		
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.091.531.600	-	-	-		
	b. Belanja Hibah	886.268.400	-	-	-		
	c. Belanja Modal	22.200.000	-	-	-		
	JUMLAH	22.338.827.646	4.398.619.152	19,69	21,35		

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan capaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Tahun 2025 dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029, sehingga adanya revisi indikator dan target kinerja. Dibawah ini dapat dilihat realisasi program/kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

A. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan I tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan I tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

C. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan I tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Capaian Target Kinerja

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja, diantaranya yaitu :

1. Semakin Berkurangnya SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Penyuluh Pertanian Lapangan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, dari tahun ke tahun jumlah penyuluh pertanian lapangan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya penyuluh yang pensiun tanpa adanya penambahan penyuluh yang baru baik dari formasi PNS maupun PPPK.

2. Masih Rendahnya SDM Petani/Peternak.

Saat ini sebagian besar petani/peternak sudah berusia lanjut dan uzur. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap kualitas SDMnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan SDM petani/peternak adalah menumbuh kembangkan petani/peternak dari kalangan muda atau disebut dengan nama petani milenial.

3. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat

Penggunaan bersertifikat khususnya padi sawah sampai kondisi tahun 2024 masih rendah yaitu hanya baru mencapai $\pm 16\%$ dari total luas tanam.

4. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah Sapi Pesisir, Itik Bayang, Padi Varietas Bawaan, Jengkol Barih Pessel dan Jengkol Lokan Pessel. Namun belum diusahakan secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.

5. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Pakan Alternatif Untuk Pakan Unggas Dan Pakan Hijauan.

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan

formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Target Program

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan dam parit saluran, penerapan teknologi pertanian dari penggunaan alat mesin pertanian dan benih ternak unggul membawa dampak pada program terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Implikasi yang timbul pada petani yang biasanya 1 kali tanam dalam setahun dengan adanya jaringan irigasi bisa dilakukan 2 – 3 kali tanam dalam setahun. Disamping itu juga dengan dilakukannya penerapan alsintan (alat mesin pertanian) dari pra panen sampai pasca panen lebih efisien dan efektif. Dan penggunaan benih ternak unggul telah dapat meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Faktor Penyebab Tersebut

Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan produksi pertanian maka perlu dilakukan bimtek untuk budidaya tanaman pangan, perlindungan tanaman terhadap OPT, peremajaan tanaman varietas unggul, bimtek bagi petugas medik veteriner dan para medik veteriter. Pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk peningkatan produksi dan peningkatan kualitas agar memiliki daya saing melalui bantuan benih/bibit tanaman bersertifikat atau jenis unggul dari alokasi dana pemerintah APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun Pusat. Pembangunan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan populasi ternak unggul.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja perangkat daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah s/d triwulan I

tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel T-C.29) dibawah ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	100,00	91,90			#DIWO!	-	91,90	91,90
		PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
		KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
		JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100,00	99,16	-	-	-	-	99,16	99,16
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	188,00	94,00	47,00	47,00	100,00	47,00	188,00	100,00
3.27.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21,00	9,00	4,00	4,00	100,00	4,00	17,00	80,95
3.27.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	75,00
3.27.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	300,00	120,00	60,00	60,00	100,00	60,00	240,00	80,00
3.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	693,00	370,00	178,00	178,00	100,00	158,00	706,00	79,06
3.27.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertibnya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
3.27.01.2.03.0001.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.03.0006.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	39,00	-	13,00	-	-	13,00	13,00	33,33
3.27.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	-	-	#DIV/0!	-	100,00	100,00
		Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	20,00	5,00	-	-	#DIV/0!	5,00	10,00	50,00
3.27.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	1.200,00	-	300,00	-	-	300,00	300,00	25,00
3.27.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48,00	-	12,00	-	-	12,00	12,00	25,00
3.27.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20,00	-	5,00	-	-	5,00	5,00	25,00
3.27.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1.200,00	-	300,00	-	-	160,00	160,00	13,33
3.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	-	-	#DIV/0!	-	100,00	100,00
		Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
		Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	98,00	95,00	1,00	1,00	100,00	1,00	97,00	98,98
		Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
3.27.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73,00	-	19,00	-	-	24,00	24,00	32,88
3.27.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	15,00	6,00	3,00	3,00	100,00	3,00	12,00	80,00
3.27.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	750,00	60,00
3.27.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
3.27.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	20,00	-	5,00	-	-	-	-	-
3.27.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	260,00	23,00	88,00	-	-	78,00	101,00	38,85
3.27.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33,00	16,00	2,00	-	-	18,00	34,00	103,03
3.27.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkeondisi baik (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	800,00	320,00	160,00	160,00	100,00	156,00	636,00	79,50
3.27.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	294,00	114,00	60,00	60,00	100,00	60,00	234,00	79,59
3.27.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
3.27.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114,00	991.713,00	487.867,00	487.867,00	100,00	535.308,00	2.014.888,00	76,78
		PERSentase KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	53,72	53,14	0,19	0,19	100,00	0,28	53,61	99,80
		PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KWH/HA)	73,62	70,17	0,57	0,57	100,00	1,79	72,53	98,52
		PERSentase TERNAK UNGGUL (%)	30,15	28,00	0,31	0,31	100,00	1,10	29,41	97,55
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Unit)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan (laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	60,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	75,00
3.27.02.2.01.0002.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	75,00	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	60,00	80,00
3.27.02.2.01.0006.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan (Laporan)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	45,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	33,33
3.27.02.2.01.0009.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	2.000,00	-	-	-	#DIV/0!	1.000,00	1.000,00	50,00
3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Laporan)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	45,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	33,33
3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura (Laporan)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	30,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	50,00
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	54,00	12,00	6,00	6,00	100,00	6,00	24,00	44,44
		Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (Kg)	50.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (Batang)	12.880,00	4.110,00	-	-	#DIV/0!	-	4.110,00	31,91
		Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	5.001,00	3.001,37	-	-	#DIV/0!	-	3.001,37	60,02
		Tersedianya bibit Perkebunan yang tersedia (Batang)	84.010,00	4.960,00	-	-	#DIV/0!	-	4.960,00	5,90
		Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-	2.000,00	19,05
		Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	75,00	61,92	4,33	4,33	100,00	4,33	70,58	94,11
3.27.02.2.02.0001.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)	12,00	-	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	66,67
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	6,00	-	2,00	-	-	2,00	2,00	33,33
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	25,00
		Jenis Pakan Ternak yang Tersedia (Jenis)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	25,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	90,00	-	-	-	#DIV/0!	25,00	25,00	27,78
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan (%)	100,00	-	-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	68,00	-	-	-	#DIV/0!	18,00	18,00	26,47
3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00	10.500,00	-	-	#DIV/0!	-	10.500,00	100,00
		Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00	33,33	-	-	#DIV/0!	-	33,33	66,66
		Jumlah Ternak yang tersedia (Ekor)	71.149,00	10.924,00	-	-	#DIV/0!	-	10.924,00	15,35
3.27.02.2.05.0001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	2,00	2,00	-	-	#DIV/0!	-	2,00	100,00
3.27.02.2.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	44.000,00	10.000,00	-	-	#DIV/0!	1,00	10.001,00	22,73
3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/ Pakan yang beredar (Ton)	40.000,00	-	-	-	#DIV/0!	10.000,00	10.000,00	25,00
3.27.02.2.05.0005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	40.000,00	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	10.000,00	25,00
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	25,00	10,00	-	-	#DIV/0!	-	10,00	40,00
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	33,33
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00	33,33	7,00	7,00	100,00	4,67	45,00	90,00
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	-	-	#DIV/0!	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	Jumlah Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	30.000,00	-	10.000,00	900,00	9,00	10.500,00	11.400,00	38,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114,00	991.713,00	487.867,00	487.867,00	100,00	524.579,00	2.004.159,00	76,37
		JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	2,00	1,62	0,08	0,08	100,00	0,18	1,88	94,00
		PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUNGALUR TERNAK (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
		PERSENTASE PENGADUANSARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)	22.746,10	-	-	-	#DIV/0!	22.746,10	22.746,10	100,00
3.27.03.2.02.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per Tahun (kali)	2,00	1,62	-	-	#DIV/0!	-	1,62	81,00
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskesmas yang representatif (unit)	3,00	3,00	-	-	#DIV/0!	-	3,00	100,00
		Persentase Lahan Sawah Betrigasi Baik (%)	76,51	74,77	0,58	0,58	100,00	0,58	75,93	99,24
		Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)	93,86	78,86	5,00	5,00	100,00	5,00	88,86	94,67
		Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian yang Berkondisi Baik (%)	75,83	54,84	6,99	6,99	100,00	7,00	68,83	90,77
3.27.03.2.02.0001.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	40,00	27,00	-	-	#DIV/0!	-	27,00	67,50
3.27.03.2.02.0002.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	135,00	60,00	9,00	9,00	100,00	25,00	94,00	69,63
3.27.03.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	11,00	3,00	-	-	#DIV/0!	2,00	5,00	45,45
3.27.03.2.02.0006.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	10,00	10,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0007.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	15,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	33,33
3.27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	44,00	21,00	-	-	#DIV/0!	2,00	23,00	52,27
3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	60,00	-	1,00	-	-	20,00	20,00	33,33
3.27.03.2.02.0011.	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/ Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0014.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.2.03.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	75,00	15,00	-	-	#DIV/0!	15,00	30,00	40,00
		Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang Dikelola (Jensi)	8,00	2,00	-	-	#DIV/0!	2,00	4,00	50,00
3.27.03.2.03.0001.	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	75,00	15,00	-	-	#DIV/0!	15,00	30,00	40,00
3.27.03.2.03.0002.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0001.	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditetapkan (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0002.	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang dikelola (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140,00	155,00	-	-	#DIV/0!	-	155,00	110,71
		PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	4,91	4,28	0,21	0,21	100,00	0,19	4,68	95,32
		PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	5,00	4,35	0,05	0,05	100,00	0,36	4,76	95,20
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	3,37	3,23	0,10	0,10	100,00	0,12	3,45	102,37
3.27.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	30,00	30,00	-	-	#DIV/0!	-	30,00	100,00
3.27.04.2.01.0002.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30,00	30,00	-	-	#DIV/0!	-	30,00	100,00
3.27.04.2.01.0003.	Pengendalian Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	60,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	75,00
3.27.04.2.01.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0005.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0006.	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	60.000,00	-	2.445,00	2.445,00	100,00	20.000,00	22.445,00	37,41
3.27.04.2.01.0007.	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	45,00	-	15,00	15,00	100,00	15,00	30,00	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.04.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Laporan)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Check Point yang Aktif (Unit)	12,00	1,00	2,00	2,00	100,00	3,00	6,00	50,00
3.27.04.2.02.0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	24,00	12,00	12,00	12,00	100,00	-	24,00	100,00
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	36,00	12,00	-	-	#DIV/0!	12,00	24,00	66,67
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)	21,00	7,00	5,00	5,00	100,00	5,00	17,00	80,95
		Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi (%)	100,00	58,33	16,67	16,67	100,00	16,67	91,67	91,67
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal/ASUH (Jenis)	5,00	5,00	-	-	#DIV/0!	-	5,00	100,00
		Jumlah Jenis Produk Hewan yang diawasi (Jenis)	25,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	80,00
		Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner(NKV) (Unit)	6,00	1,00	-	-	#DIV/0!	2,00	3,00	50,00
3.27.04.2.04.0001.	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.04.2.04.0003.	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang ditetapkan (Laporan)	6,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.04.0004.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
3.27.04.2.04.0005.	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.04.2.04.0006.	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0007.	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	4,00	4,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0008.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0009.	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkeemasan	Jumlah produk hewan segar berkeemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0010.	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.05.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.05.0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%) Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	37.495,00	15.837,59	7.619,00	7.619,00	100,00	7.119,00	30.575,59	81,55
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani (Ha)	100,00	-	-	-	#DIV/0!	25,00	25,00	25,00
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	-	-	-	-	#DIV/0!	42.184,00	42.184,00	#DIV/0!
3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.27.05.2.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	75,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	60,00
3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190,00	190,00	-	-	#DIV/0!	-	190,00	100,00
		PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	40,00	30,27	-	-	#DIV/0!	37,00	67,27	168,18
3.27.06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	10,00	10,00	-	-	#DIV/0!	-	10,00	100,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	48,00	12,00	-	-	#DIV/0!	12,00	24,00	50,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	775,00	295,00	-	-	#DIV/0!	160,00	455,00	58,71
3.27.06.2.01.0001.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.06.2.01.0002.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	48,00	4,00	8,00	8,00	100,00	12,00	24,00	50,00
3.27.06.2.01.0004.	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.06.2.01.0005.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	775,00	145,00	150,00	150,00	100,00	160,00	455,00	58,71
3.27.06.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian Yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00
3.27.06.2.02.0001.	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0003.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	40,00	-	-	-	#DIV/0!	10,00	10,00	25,00
3.27.06.2.02.0004.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan/ Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0005.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.03.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	28,00	-	-	-	#DIV/0!	7,00	7,00	25,00
3.27.06.2.03.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen (laporan)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.06.2.03.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi (laporan)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	619,00	319,00	130,00	130,00	100,00	100,00	549,00	88,69
		JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
		Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	46,39	28,07	7,17	7,17	100,00	6,34	41,58	89,63
		Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.536,00	1.694,00	438,00	438,00	100,00	1.115,00	3.247,00	58,65
		Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang Berkondisi baik (%)	92,50	79,17	4,16	4,16	100,00	3,67	87,00	94,05
		Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang Berkondisi baik (%)	91,88	76,88	4,62	4,62	100,00	6,63	88,13	95,92
		Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	48,88	48,88	-	-	#DIV/0!	-	48,88	100,00
3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	75,00	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	60,00	80,00
3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.536,00	1.694,00	438,00	438,00	100,00	1.115,00	3.248,00	58,67
3.27.07.2.01.0003.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	655,00	11,00	84,00	84,00	100,00	120,00	215,00	32,82
3.27.07.2.01.0005.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	97,00	30,00	38,00	38,00	100,00	18,00	86,00	88,66
3.27.07.2.01.0006.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	35,00	35,00	#DIV/0!
3.27.07.2.01.0007.	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!
3.27.07.2.01.0008.	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk (Unit)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	33,33
3.27.07.2.01.0009.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

- a) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Hasil Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah laporan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3
Target Kinerja Indikator 1**

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai AKIP perangkat daerah	Angka	89,98 (A)	90,43 (AA)	90,88 (AA)	91,34 (AA)	91,79 (AA)	92,25 (AA)

b) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Nilai kematangan inovasi perangkat daerah merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan nilai kematangan inovasi perangkat daerah adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Target nilai kematangan inovasi perangkat daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4
Target Kinerja Indikator 2**

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Kematangan Inovasi perangkat daerah	Angka	91	92	93	94	95	96

c) Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK

Indikator nilai PDRB sektor pertanian ADHK digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Untuk menentukan nilai PDRB sektor pertanian ADHK adalah jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Target nilai PDRB sektor pertanian ADHK tahun 2025-2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Target Kinerja Indikator 3

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK	Rp.	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885

Untuk lebih lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.30) dibawah ini.

Tabel 2.6 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Per Triwulan I Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	-	√	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	89,50 (A)	-	90,43 (AA)	
2	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	√	100	100	100	90	-	100	
3	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	-	√	3,1 Trilyun	3,16 Trilyun	3,23 Trilyun	3,05 Trilyun	-	3,23 Trilyun	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;

- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029, adapun permasalahan dan hambatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

a) Rendahnya Tingkat Pendapatan Petani

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani. Sesuai laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata pendapatan per kapita petani per bulan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.096.372, tahun 2022 sebesar Rp.1.255.288, tahun 2023 sebesar Rp.1.395.192 dan

tahun 2024 sebesar Rp.1.395.192. Dari data tersebut dapat dilihat ada peningkatan pendapatan petani setiap tahunnya, namun jika dilihat dari tingkat pendapatan petani per harinya masih rendah hanya mencapai Rp.46.506,40 pada tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

b) Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan, banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian sangat pesat terutama lahan pertanian yang berada di sepanjang jalan raya.

Sebagai salah satu upaya menekan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan selain tanaman pangan, diatur dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam perda ini lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 25.219,20 hektar yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan total luas 17.944,25 hektar;
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan total luas 4.801,88 hektar; dan
- Lahan Rawan Konversi dengan total luas 2.473,07 hektar.

c) Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga masih sangat minim sekali. Potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga sangat besar sekali di Kabupaten Pesisir Selatan.

d) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian

● Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan melalui kegiatan Brigade Pangan (BP) yang diluncurkan Kementerian Pertanian tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan sebanyak 54 unit BP yang terdiri dari alsintan pra panen dan pasca panen yang tujuannya mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

● Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat. Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka

tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur.

Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Pada Tahun 2024, lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan seluas \pm 6.492,17 hektar atau sebesar 27,18% dari total luas sawah 23.885,09 hektar (statistik pertanian tahun 2024), artinya masih sangat luas lahan sawah yang belum teraliri air irigasi dengan baik.

e) Rendahnya Penggunaan Benih Berkualitas Dan Bersertifikat.

Penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pada tahun 2024 penggunaan benih

berkualitas dan bersertifikat tanaman padi sawah baru mencapai $\pm 16\%$ dari total luas tanam padi sawah.

Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi sarana dan prasarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat. Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis tanaman tersebut. Sumber daya genetik lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah *Padi Sawah Varietas Bawaan* dan *Jengkol Varietas Berek Pessel dan Lokal Pessel* yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu jenis tanaman asli lokal asal Kabupaten Pesisir Selatan.

f) Masih Tingginya Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Anorganik dan Pestisida

Penggunaan pupuk anorganik rata-rata untuk sekali musim tanam adalah 300 kg/ha dan pemakaian pestisida sebagian besar tidak sesuai anjuran. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terus menerus akan mengakibatkan:

- **Pencemaran Air**

Salah satu dampak paling serius dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia adalah pencemaran air. Limbah dari bahan-bahan kimia ini dapat mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.

- Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Selain dapat mencemari air, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian serangga yang penting dalam rantai makanan alami. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem alami dan mengurangi keanekaragaman hayati. Penurunan populasi serangga dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pertanian dan lingkungan secara keseluruhan.

- Resistensi Hama dan Gulma

Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan perkembangan resistensi pada hama dan gulma terhadap pestisida. Akibatnya, petani sering kali harus menggunakan dosis yang lebih tinggi atau jenis pestisida yang lebih kuat untuk mencapai efek yang sama. Ini bukan hanya meningkatkan biaya produksi tetapi juga memberikan tekanan lebih besar pada lingkungan.

- Pengurangan Kesuburan Tanah

Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah. Ini dapat mengurangi kesuburan tanah secara jangka panjang dan menyebabkan degradasi kualitas tanah. Tanah yang kurang subur mempengaruhi produktivitas pertanian dan memerlukan upaya ekstra untuk pemulihan kesuburan.

- Dampak Kesehatan Manusia

Selain dampak lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang

terhadap residu pestisida pada makanan dapat meningkatkan risiko kesehatan manusia. Gangguan hormon, masalah reproduksi, dan risiko terkena kanker merupakan beberapa dampak kesehatan serius yang dapat timbul dari paparan ini. Kesehatan petani dan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia.

Meskipun pupuk dan pestisida kimia memberikan manfaat segera dalam peningkatan hasil panen, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tidak boleh diabaikan. Petani perlu mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan mempertimbangkan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Dengan memahami dampak negatif dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi lingkungan, meningkatkan kualitas tanah, dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara bijak, kita dapat mendukung pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

g) Belum Optimalnya Produksi Pertanian

Secara umum ada 2 (dua) cara upaya peningkatan produksi pertanian, yaitu (1) Ekstensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memperluas areal pertanian, dan (2) Intensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada). Upaya intensifikasi salah satunya adalah peningkatan

produktivitas. Produktivitas padi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 4,69 ton/ha, tahun 2021 sebesar 4,83 ton/ha, tahun 2022 sebesar 5,05 ton/ha, tahun 2023 sebesar 4,93 ton/ha dan tahun 2024 sebesar 4,59 ton/ha.

h) Terjadinya Gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Serangan OPT untuk tanaman padi yang paling besar adalah serangan hama wereng dan tikus yang hampir merata di setiap kecamatan. Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petan. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

i) Terbatasnya Ketersediaan Benih/Bibit Unggul Ternak

Setiap tahunnya Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan benih ternak (Frozen Semen/Embrio Sapi) sebanyak \pm 10.000 straw dengan jumlah aseptor (sapi indukan) \pm 25.000 ekor. Selama ini kebutuhan akan benih ternak tersebut ditunjang bantuan dari Provinsi dan Pusat, rata-rata setiap tahunnya kontribusi provinsi dan pusat adalah sebesar \pm 8.000 straw atau

hampir 80% dari total kebutuhan per tahunnya. Disamping itu di Kabupaten Pesisir Selatan belum adanya kelembagaan peternakan yang bergerak dibidang penyediaan benih/bibit unggul ternak.

j) Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Populasi Ternak

Ada beberapa upaya peningkatan populasi ternak, yaitu:

- **Inseminasi Buatan (IB)**

Kondisi saat ini tingkat kelahiran hasil IB di Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong rendah yaitu dibawah 50%. Merujuk hasil penelitian terhadap sapi bali, rata-rata persentase keberhasilan IB adalah mencapai 66,89%.

- **Penanganan Gangguan Reproduksi**

Gangguan reproduksi pada ternak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

Malnutrisi: Kekurangan mineral seperti selenium yang penting untuk fungsi reproduksi dapat menyebabkan kesulitan dalam proses reproduksi.

Penyakit Menular: Penyakit seperti IBR, BVD, dan Brucellosis dapat mempengaruhi kualitas sperma dan berahi.

Stress: Stress panas dan demam juga dapat mempengaruhi kualitas sperma sebelum disimpan untuk ternak.

Kesehatan Reproduksi: Kesehatan reproduksi yang buruk dapat menyebabkan anestrus dan penurunan fertilitas.

Manajemen: Buruknya sistem pemeliharaan dan tingkat kegagalan kebuntingan juga dapat menjadi penyebab gangguan reproduksi.

Dengan memahami faktor-faktor ini, peternak dapat melakukan penanganan yang tepat untuk mencegah gangguan reproduksi dan memastikan kesehatan reproduksi ternak.

- **Pengendalian Pematangan Betina Produktif.**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa ternak ruminansia besar betina produktif (sapi atau kerbau) dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian penyakit hewan.

k) Masih Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Produksi Pakan Ternak

Pakan ternak berkualitas adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan spesifik hewan ternak. Nutrisi utama yang harus ada dalam pakan meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pada usaha peternakan rakyat, pakan yang diberikan umumnya sesuai dengan kemampuan peternak, bukan sesuai dengan kebutuhan ternaknya.

Pemberian pakan tentu bukan sekedar membuat ternak kenyang, karena kenyang bukanlah standar bahwa kebutuhan nutrisi akan ternak terpenuhi. Rasa kenyang bukan pula hanya berbicara tentang jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak, akan tetapi kandungan nutrisi pakan juga sangat berpengaruh. Aktivitas makan oleh ternak berkaitan dengan sistem saraf (neuro system), melibatkan central nervous system (CNS) yang mengontrol tingkat konsumsi energi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan

ternak, atau dalam bahasa sederhana ternak tidak akan berhenti makan jika kebutuhan energinya tidak tercukupi. Hal ini berkaitan dengan kualitas pakan karena dengan tersedianya nutrisi yang cukup akan dapat memenuhi kebutuhan energi ternak. Di Kabupaten Pesisir Selatan para peternak masih sangat minim penggunaan teknologi fermentasi pakan sebagai cadangan pakan yang berkualitas.

I) Belum Optimalnya Penanganan Penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) Dan Zoonosis

Penyakit hewan menular strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tinggi pada hewan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial, serta dapat menular ke manusia. Definisi Zoonosis

Zoonosis adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Zoonosis dapat berasal dari hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Potensi berkembangnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di Kabupaten Pesisir Selatan sangat besar seperti jembrana, LSD, penyakit mulut dan kuku dan rabies.

Tahun 2020 kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis sebanyak 2.194 kasus, tahun 2021 sebanyak 2.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 9.925 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.860 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.944 kasus. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan atas kejadian penyakit hewan menular strategis sampai 261,83% jika

dibandingkan dengan tahun 2021 karena terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis harus menjadi program prioritas bagi bidang yang menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

m) Masih Kurangnya Perlindungan Masyarakat Dari Segi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sampai tahun 2024, jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 (tiga) unit dari total 14 (empat belas) unit usaha. Salah satu faktor belum adanya unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat NKV yaitu belum adanya Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi syarat untuk penerbitan NKV. Diharapkan dengan telah dibangunnya RPH ini, seluruh unit pangan asal hewan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Sertifikat NKV sampai tahun perencanaan berakhir.

n) Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman

Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah yaitu padi sawah varietas Bawaan, jengkol varietas Lokan Pessel dan Barih Pessel, sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian sumber daya genetik hewan/tanaman tersebut.

o) Belum Optimalnya Diversifikasi Pengembangan Usaha Komoditas Pertanian

Pengembangan komoditas pertanian menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi produk pertanian.

p) Keterbatasan Akses Petani Terhadap Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

q) Terbatasnya Kualitas SDM Petugas Dan Petani Serta Kapasitas Kelembagaan Petani

Kualitas sumberdaya manusia petugas masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang, kondisi tahun 2025 jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 84 orang dan diperkirakan sampai tahun 2030 jumlah PPL hanya tinggal 54 orang sehingga luas wilayah Kabupaten yang terdiri atas 182 Nagari tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada disamping itu juga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur di Kecamatan. Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.

r) Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan Pertanian dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi dan pelayanan kesehatan hewan kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

s) Standar Kualitas Produk Pertanian Belum Memadai

Saat ini masih banyak produk pertanian yang belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan

oleh pasar, baik domestik maupun internasional.

t) Persaingan Pasar Dan Ketidakstabilan Harga Produk Pertanian

Sektor pertanian sangat ketat dalam persaingan pasar dengan produk dari daerah lain yang sudah lebih maju dalam proses hilirisasi dan ketidakstabilan harga. dimana fluktuasi harga produk pertanian dapat mempengaruhi keuntungan dari kegiatan hilirisasi.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, Seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah turunan dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang merupakan gambaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 dalam pencapaian target pembangunan di sektor pertanian guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat terkait langsung dengan visi, misi,

serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparat pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Misi 3 : Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi salah satu bahan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan.	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Birokrasi Yang Efisien, Adil, Dan Berkinerja Tinggi	Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum berjalan optimal	Masih rendahnya SDM ASN	Pendidikan dan latihan bagi ASN
	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.	Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif .	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) i. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak j. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak k. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian k. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul l. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak m. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi j. Kewenangan Dinas dalam pengembangan

		<p>pakan ternak</p> <p>l. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis</p> <p>m. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>n. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman</p> <p>o. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian</p> <p>p. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan</p> <p>q. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani</p> <p>r. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>s. Standar kualitas produk pertanian belum memadai</p> <p>t. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian</p>	<p>dan zoonosis</p> <p>n. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</p> <p>o. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis</p> <p>p. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal</p> <p>q. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian</p> <p>r. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani</p> <p>s. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang</p> <p>t. Rendahnya kapasitas petugas dan petani</p> <p>u. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>v. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak</p> <p>w. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran</p> <p>x. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal</p>	<p>komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan</p> <p>k. Ketersediaan sumber daya pertanian</p> <p>l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian</p> <p>m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>n. Sinergisitas antar perangkat daerah</p> <p>o. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat</p> <p>p. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan</p> <p>q. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar</p> <p>r. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek</p> <p>s. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>t. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran</p>
--	--	---	--	---

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, dipengaruhi oleh faktor internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (*STRENGTHS*)

1. Tersedianya Lahan Sawah seluas 22.832 Ha;
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Adanya Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;

4. Tersedianya Sumber Daya Manusia sebanyak 278 orang, yang terdiri atas PNS, PPPK, dan Non ASN;
5. Tersedianya Kelembagaan Kelompok Tani sebanyak 2.232 unit dan Gapoktan sebanyak 159 unit;
6. Tersedianya Balai Benih Induk dan Brigade Alsintan;
7. Tersedianya 15 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan 7 unit Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan); dan
8. Adanya teknologi spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kelemahan (*WEAKNESSES*)

1. Rendahnya Mutu/Kualitas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan;
2. Masih rendahnya pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Masih rendahnya ketersediaan benih unggul ternak;
4. Masih rendahnya sarana pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pertanian/Perkebunan dan Obat-obatan serta vaksin hewan/ternak;
5. Masih banyaknya Jaringan Irigasi tersier yang rusak;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi spesifik lokasi Pertanian/Perkebunan/Peternakan;
7. Masih ditemukannya penyaluran pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran;
8. Masih terbatasnya modal petani/peternak dalam melakukan usaha tani yang berorientasi agribisnis;
9. Masih kurangnya alat mesin Pertanian/Perkebunan/Peternakan; dan
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas ASN.

Peluang (*OPPORTUNITIES*)

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai;
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Adanya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian;
4. Tersedia IPTEK pertanian terapan;
5. Peluang pasar yang masih terbuka/meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
6. Letak geografis Pesisir Selatan yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional;
7. Potensi sumberdaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir; dan
8. Potensi SDM petani millennial dalam mendukung pembangunan pertanian.

Ancaman (*THREATS*)

1. Rendahnya minat para pemuda/pemudi berusaha dibidang pertanian, sementara saat ini para petani yang ada sudah berumur diatas \pm 55 tahun;
2. Pemilikan lahan usaha tani relatif sempit;
3. Degradasi sumber daya lahan dan air;
4. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif;
5. Rendahnya minat petani untuk menggunakan benih bersertifikat;
6. Biaya produksi usahatani masih tinggi;
7. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim serta penyakit hewan dan ternak;
8. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian;

9. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
10. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan tani;
11. Daya saing produk masih rendah; dan
12. Berkembangnya pasar bebas.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Catatan Strategis Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun isu-isu penting dan catatan strategis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan petani;
- 2) Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan;
- 3) Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur, buah dan biofarmaka;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur) pertanian;
- 5) Peningkatan penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat;
- 6) Semakin berkurangnya unsur hara dalam tanah;
- 7) Rendahnya produktivitas pertanian;
- 8) Pengendalian Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- 9) Peningkatan benih/bibit unggul ternak di masyarakat;
- 10) Akselerasi peningkatan populasi ternak khususnya pada sapi dengan optimalisasi Inseminasi Buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif;
- 11) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak;

- 12) Optimalisasi penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
- 13) Peningkatan perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 14) Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman;
- 15) Diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian;
- 16) Peningkatan akses petani terhadap pembiayaan;
- 17) Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- 18) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan yang representatif dan strategis;
- 19) Peningkatan kualitas produk pertanian; dan
- 20) Stabilitas harga produk pertanian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih spesifik dan terukur yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Program prioritas dan karakteristik Dinas Pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Daerah dalam penanganan urusan bidang pertanian. Dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan

pertanian penyusunan program dan kegiatannya mengacu kepada program prioritas dan karakteristik Dinas Pertanian yang selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Usulan Para Pemangku Kepentingan.

Usulan para pemangku kepentingan meliputi usulan hasil musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

3) Hasil Forum perangkat daerah.

Dalam penyusunan perubahan Renja tahun 2025 ini, hasil forum perangkat daerah juga dijadikan salah satu indikator dalam melakukan review terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah. Usulan yang selaras dengan rencana kerja Dinas Pertanian baik itu program prioritas, karakteristik maupun arah kebijakan akan diakomodir dalam perubahan Renja Dinas Pertanian tahun 2025.

Setelah dilakukan review, tidak ada temuan-temuan perbedaan yang mendasar pada tahap rancangan awal RKPD Perubahan ini. Review terhadap rancangan awal RKPD perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.8 (T-C.31):

Tabel 2.8 (TC.31)
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	
DINAS PERTANIAN						DINAS PERTANIAN						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
					19.867.774.341					19.867.774.341		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.176.667.037	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.176.667.037
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%) Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%) Jumlah Inovasi (Inovasi)	0,5 91 7	18.176.667.037	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%) Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%) Jumlah Inovasi (Inovasi)	0,5 91 7	18.176.667.037		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.849.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.849.200		
	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4 19 6 - 1 1 -	370.849.200	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4 19 6 - 1 1 -	370.849.200		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.598.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.598.750		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	16.598.750	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	16.598.750		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.664.000		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.664.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.894.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.894.950		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4.894.950	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4.894.950		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				336.027.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				336.027.500		
	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	336.027.500	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	336.027.500		
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		
	Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usuran yang Diampukan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usuran yang Diampukan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usuran yang Diampukan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usuran yang Diampukan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD				-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD				-		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.379.823.945	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.379.823.945		
	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.379.823.945	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.379.823.945		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.017.029.695	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.017.029.695		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.017.029.695	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.017.029.695		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				358.676.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				358.676.000		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	358.676.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	358.676.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.118.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.118.250		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.118.250	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.118.250		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.865.225	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.865.225		
	Terlindunginya barang milik daerah dengan baik		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	24.865.225	Terlindunginya barang milik daerah dengan baik		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	24.865.225		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24.865.225	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24.865.225		
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	24.865.225	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	24.865.225		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.047.862	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.047.862		
	Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	-	8.047.862	Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	-	8.047.862		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.879.200	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.879.200		
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2.879.200	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2.879.200		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.168.662	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.168.662		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5.168.662	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5.168.662		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.249.772	Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.249.772		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	120.249.772	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	120.249.772	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.663.552	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.663.552	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.663.552	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.663.552	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.952.680	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.952.680	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	34.952.680	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	34.952.680	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.260.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.260.340	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	6.260.340	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	6.260.340	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu				3.300.000	Fasilitas Kunjungan Tamu				3.300.000	
	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3.300.000	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.355.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.355.000	
	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	61.355.000	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	61.355.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.318.200	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.318.200	
	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.318.200	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.318.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.175.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.175.000	
	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	28.175.000	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	28.175.000	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	
	Pengadaan Mebel				-	Pengadaan Mebel				-	
	Tersedianya Mebel	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	Tersedianya Mebel	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.175.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.175.000	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	28.175.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	28.175.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.104.416.033	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.104.416.033	
	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.104.416.033	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.104.416.033	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.930.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.930.000	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	133.930.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	133.930.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				970.486.033	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				970.486.033	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	970.486.033	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	970.486.033	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.240.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.240.000	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	140.240.000	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	140.240.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.690.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.690.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.690.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.690.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.200.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	210	91.200.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	210	91.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.350.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	8.350.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	8.350.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				128.110.150	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				128.110.150	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	128.110.150	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	128.110.150	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5		
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1				Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5		
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22				Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				70.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				70.000.000	
	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	70.000.000	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	70.000.000	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah				-	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah				-	
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				-	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				-	
	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				-	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				-	
	Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-	Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-	
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	
	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				-	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				-	
	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-	
	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				-	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				-	
	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak		Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak		Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-	
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				-	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				-	
	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				-	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				-	
	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				-	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				-	
	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000	
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	30.000.000	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	30.000.000	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000	-			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000	-	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	
	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	-	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	-	
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				30.000.000	
	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1450	30.000.000	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1450	30.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				970.967.800	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				970.967.800	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	22.746,1	970.967.800	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	22.746,1	970.967.800	
			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1	-			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500				Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500		
			Indeks Pertanian (Angka)	1,85				Indeks Pertanian (Angka)	1,85		
	Pengembangan Prasarana Pertanian				670.967.800	Pengembangan Prasarana Pertanian				670.967.800	
	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800	
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-		
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	-				Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				670.967.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				670.967.800	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	-		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				-	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-		
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				-	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-	-	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-	-	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota					
	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-	-	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-	-	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota					
	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-	-	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-	-	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					
	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	-	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	-	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				300.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian				300.000.000	
	Terbangunnya prasarana pertanian		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	300.000.000	Terbangunnya prasarana pertanian		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	300.000.000	
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-				Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	-				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	-		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				100.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kabupaten Pesisir Selatan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	100.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kabupaten Pesisir Selatan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	100.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				200.000.000	
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	200.000.000	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	200.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	
	Terbangun, terahabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,	-	-	Terbangun, terahabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				-	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				-	
	Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				-	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				-	
	Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	
	Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-	Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				-	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				-	
	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				-	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				-	
	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				24.469.910	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				24.469.910	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	24.469.910	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	24.469.910	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100		
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69		
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah				24.469.910	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah				24.469.910	
	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat		Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	24.469.910	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat		Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	24.469.910	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-				Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-		
			Jumlah kader zoonosis (Orang)	-				Jumlah kader zoonosis (Orang)	-		
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				-	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				-	
	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-	-	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				-	
	Terbentuknya kader zoonosis	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kader zoonosis (Orang)	-	-	Terbentuknya kader zoonosis	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kader zoonosis (Orang)	-	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				-	
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-	-	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-	-	
	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				-	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				-	
	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-	-	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-	-	
	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				-	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				-	
	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	-	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	-	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.469.910	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.469.910	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	24.469.910	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	24.469.910	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah				-	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah				-	
	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	-	-	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	-	-	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	-				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	-		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-				Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-		
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				-	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				-	
	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	-	-	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	-	-	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				-	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				-	
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				-	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				-	
	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat	-	-	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat	-	-	
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				-	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				-	
	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-	
	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				-	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				-	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-	-	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-	-	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	
	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	-	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-				Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-		
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-				Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-		
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-		
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				-	
	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		-	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	-	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	
	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-	-	
	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				-	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				-	
	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-	-	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-	-	
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit				-	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit				-	
	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-	-	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				-	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				-	
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-	
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				-	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				-	
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-	
	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				-	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				-	
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				-	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				-	
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-	-	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	-	-	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	-	-	
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	-			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	-	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				-	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Selatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Selatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	-	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	-	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				-	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				-	
	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	-	-	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	-	-	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				33.296.226	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				33.296.226	
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	33.296.226	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	33.296.226	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				33.296.226	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				33.296.226	
	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian		Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	33.296.226	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian		Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	33.296.226	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-				Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141		
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				-	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				-	
	Terusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	Terusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				-	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				-	
	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	
	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak				-	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak				-	
	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				33.296.226	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				33.296.226	
	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	33.296.226	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	33.296.226	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				-	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				-	
	Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-	Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-	
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-				Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-				Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-		
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-				Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-		
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	-				Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	-		
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				-	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				-	
	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				-	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				-	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				-	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau Pasar Hewan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau Pasar Hewan				-	
	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau	-	-	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau	-	-	
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				-	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				-	
	Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-				Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				-	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-	-	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				-	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				534.263.218	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				534.263.218	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20,78	534.263.218	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20,78	534.263.218	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80		
			Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100				Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				534.263.218	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				534.263.218	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan	-	534.263.218	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan	-	534.263.218	
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian yang terangkum dalam perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini juga menampung usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui Proposal kegiatan. Usulan yang disampaikan oleh masyarakat relevan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan termasuk prioritas program dan kegiatan yang direncanakan. Namun usulan dari masyarakat masih banyak yang kurang lengkap informasi mengenai volume/besaran, usulan biaya, sasaran lokasi sehingga memerlukan tahapan verifikasi langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9 (T-C.32):

Tabel 2.9 (T-C.32)
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN					
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Pessel	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5	
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5	
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22	
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	
			- <i>Pengadaan Bibit Sawit (Batang)</i>	1.365	<i>Pokir Darmansyah</i>
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pessel	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746,1	
			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1	
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500	
			Indeks Pertanaman (Angka)	1,85	
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pessel	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pessel	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	
			- <i>Peningkatan Jalan Usaha Tani (Unit)</i>	1	<i>Pokir Darmansyah</i>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2030 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita yaitu:

Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

Asta Cita 4 Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan

Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 3.1 dibawah ini dapat dilihat keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2025-2029.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Tranformasi digital	Tranformasi ekonomi
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	
		Penerapan ekonomi hijau	
Hukum berkeadilan, keamanan			

	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
		Stabilitas ekonomi makro	
		Ketangguhan diplomasi dan pertahanan budaya gentar kawasan	
		Lingkungan hidup berkualitas	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Transformasi digital	Transformasi ekonomi	
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi		
	Integrasi ekonomi domestik dan global		
4. Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Kesehatan untuk semua	Transformasi ekonomi	
	Pendidikan berkualitas yang merata		
	Perlindungan sosial yang adaptif		
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	Transformasi sosial	
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	Transformasi ekonomi	
	Integrasi ekonomi domestik dan global		
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Perlindungan sosial yang adaptif	Tranformasi sosial	
	Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Transformasi ekonomi	
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan	Tranformasi digital	Transformasi ekonomi	
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi		
	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Transformasi tata kelola	
	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan	

		Stabilitas ekonomi makro	Indonesia
	8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Lingkungan hidup berkualitas	
		Resiensi terhadap bencana dan perubahan iklim	

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah maka visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yakni:

“Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

**Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat	a. Meningkatkan kesejahteraan petani b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian	a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian b. Terwujudnya kemandirian	a. Meningkatnya pendapatan petani b. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan c. Meningkatnya cadangan pangan

Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia 	<ul style="list-style-type: none"> pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia 	<ul style="list-style-type: none"> nasional d. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian e. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan f. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian g. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan
---	---	---	---

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2025-2029, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rendahnya tingkat pendapatan petani	Jam kerja petani belum optimal	Optimalisasi jam kerja petani
2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura,

		<ul style="list-style-type: none"> j. peningkatan populasi ternak k. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak l. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman m. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian n. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan o. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani p. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> q. ternak unggul r. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak s. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal t. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian u. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani v. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang w. Rendahnya kapasitas petugas dan petani x. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> y. perkebunan dan Peternakan z. Ketersediaan sumber daya pertanian aa. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian ab. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura ac. Sinergisitas antar perangkat daerah ad. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat ae. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar af. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek ag. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian ah. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
3	Meningkatnya cadangan pangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak j. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak k. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman l. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian m. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul k. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak l. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal m. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian n. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan j. Ketersediaan sumber daya pertanian k. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian l. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura m. Sinergisitas antar perangkat daerah

		<ul style="list-style-type: none"> n. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani o. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> o. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang p. Rendahnya kapasitas petugas dan petani q. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> n. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat o. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
4	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran b. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian e. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Standar kualitas produk pertanian belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian b. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
6	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Degradasi sumber daya lahan dan air b. Kurangnya penerapan teknologi pertanian c. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
7	Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan

3.1.2 Kebijakan Provinsi

Visi pembangunan provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”

Visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2029 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2025-2029, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Wakil (WKDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;
- Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
- Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan;

- Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;
- Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana;
- Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas;
- Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM; dan
- Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

a) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing”***. Sasaran yaitu ***“Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan”***

Strategi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas produksi berbasis kawasan. Fokus pada pengembangan kawasan tanaman pangan, melalui penetapan kawasan komoditi, penguatan korporasi petani, dan integrasi sistem budidaya.
- Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur pendukung. Meliputi penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat, pupuk berimbang, alat mesin pertanian (alsintan), jalan usaha tani, dan irigasi tersier.

- Modernisasi pertanian dan penguatan SDM petani. Melalui pemberdayaan petani milenial, pelatihan budidaya ramah lingkungan, adopsi teknologi digital, dan penguatan Balai Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan yang tersebar di Kabupaten/Kota
- Pengembangan kemitraan dan kelembagaan agribisnis. Fasilitasi MoU antara kelompok tani dengan pelaku industri, pelatihan manajemen agribisnis, dan penguatan koperasi tani sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagainya.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk

	(Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim	bersubsid
i.	Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman	j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian	j. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
j.	Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian	k. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal	k. Ketersediaan sumber daya pertanian
k.	Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan	l. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian	l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian
l.	Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani	m. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani	m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura
m.	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian	n. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang	n. Sinergisitas antar perangkat daerah
n.	Standar kualitas produk pertanian belum memadai	o. Rendahnya kapasitas petugas dan petani	o. Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman yang cukup besar
o.	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	p. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek
		q. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak	q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
		r. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran	r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
		s. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	

b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan berbasis kelanjutan”***. Sasaran yaitu :

- Meningkatkan produksi komoditas peternakan; dan
- Meningkatkan perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Strategi yang diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan melalui peningkatan kualitas bibit, peningkatan kualitas pakan, pemanfaatan teknologi

reproduksi, peningkatan nilai tambah produk peternakan dan peningkatan SDM peternakan;

- Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan strategis dan zoonosis melalui sistem deteksi dini, vaksinasi massal, dan biosekuriti lintas wilayah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi komoditas peternakan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian d. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak e. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak g. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan h. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan i. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani j. Standar kualitas produk pertanian belum memadai	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul h. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak i. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal j. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani k. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang l. Rendahnya kapasitas petugas dan petani m. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran n. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas peternakan h. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas Peternakan i. Ketersediaan sumber daya pertanian j. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian k. Sinergisitas antar perangkat daerah l. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat

		k. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian		m. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang cukup besar n. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek o. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
2.	Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan d. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan Dinas Pertanian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Berdaya Saing Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

3.2.2 Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah.
- Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian.

Secara umum dapat dilihat sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN					KET (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)		2030 (11)
3.27.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN											
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	0	100	100	100	100	100	100	
			Nilai AKIP daerah (Angka)	89.50	89.98	90.43	90.88	91.34	91.79	92.25	
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai Kematangan Inovasi perangkat daerah (Angka)	90	91	92	93	94	95	96	
			Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)	3.050.000.000.000	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885	

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, serta dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kerja perangkat daerah, serta dengan menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025 – 2029.

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

- a) Pencapaian misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 pada butir ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”** dan butir ke 3 (tiga) yaitu **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Kebijakan umum pada strategi tersebut adalah peningkatan produksi pertanian dengan program prioritas :
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
 - Program Penyuluhan Pertanian.

- b) Pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program pada perubahan Renja tahun 2025 ini adalah sebanyak 6 (enam) program yang terdiri atas 5 (lima) program pembangunan dan 1 (satu) program pendukung. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar dan terfokus. Lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dalam arti bahwa upaya yang dilakukan dalam pembangunan pertanian merata keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan, dan yang terfokus adalah penempatan kegiatan berdasarkan peta kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian yang telah ditetapkan. Uraian program dan kegiatan rutin, pembangunan dan penunjang sebagai berikut:

A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 5. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

B) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

C) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; dan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

D) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

E) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Kebutuhan dana/pagu indikatif sesuai dengan sumber pendanaannya dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.19.867.774.341 yang dipergunakan untuk program pembangunan sebesar Rp.1.691.107.304 dan untuk program pendukung sebesar Rp.18.176.667.037.

3.3.3 Penjelasan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam penyusunan perubahan Renja tahun 2025 ini, penyusun target kinerja dan anggaran sesuai dengan rancangan awal perubahan RKPD, arahan dari Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan jika ada program/kegiatan yang tidak sesuai target kinerja dan anggarannya dengan rancangan awal RKPD dapat menyesuaikan dengan target kinerja dan mengurangi jumlah anggaran pada masing masing program sesuai dengan plafonisasi. Program dan kegiatan yang tidak terakomodir di APBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat diajukan anggaran ke APBD Propinsi dan APBN.

3.3.4 Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Bagian (perumusan program dan kegiatan)

Perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 (Tabel TC.33) sebagai berikut:

Tabel 3.7 (TC.33)
 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		DINAS PERTANIAN									
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			19.867.774.341				44.673.250.695		
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.176.667.037				19.677.515.695		
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%) Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%) Jumlah Inovasi (Inovasi)	0,5 91 7	18.176.667.037			0,5 91 7	19.677.515.695	Dinas Pertanian	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			370.849.200				76.000.000		
		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4 19 6 - 1 1 - -	370.849.200			4 19 6 1 1 1 1	76.000.000		
	3.27.01.2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.598.750				15.000.000		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	16.598.750	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6	15.000.000		
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.664.000				7.000.000		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.000.000		
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.664.000				7.000.000		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.000.000		
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.894.950				5.000.000		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4.894.950	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	4	5.000.000		
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			336.027.500				20.000.000		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	336.027.500	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	19	20.000.000		
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			-				10.000.000		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	10.000.000		
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-				7.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.000.000		
	3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			-				5.000.000		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.000.000		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.379.823.945				16.145.165.695		
		Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.379.823.945			1	16.145.165.695		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13				13			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146				146			
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.017.029.695				16.016.405.695		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.017.029.695	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	146	16.016.405.695		
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			358.676.000				124.560.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	358.676.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	124.560.000		
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.118.250				4.200.000		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.118.250	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	13	4.200.000		
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			24.865.225				60.000.000		
		Terlindungnya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	24.865.225			1	60.000.000		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-				1			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1				1			
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			24.865.225				50.000.000		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	24.865.225	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-				5.000.000		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.000.000		
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-				5.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.000.000		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.047.862				44.600.000		
		Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	-	8.047.862			146	44.600.000		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1				5			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1				1			
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.879.200				5.000.000		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2.879.200	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.000.000		
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.168.662				25.000.000		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5.168.662	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	25.000.000		
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-				14.600.000		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	146	14.600.000		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			120.249.772				451.400.000		
		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	120.249.772			1	451.400.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3				3			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12				12			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				1			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1			
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.663.552				11.000.000		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.663.552	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	11.000.000		
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.952.680				145.000.000		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	34.952.680	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	145.000.000		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6.260.340				15.000.000		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	6.260.340	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	15.000.000		
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.400.000				5.400.000		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	3	5.400.000		
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.300.000				15.000.000		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3.300.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	12	15.000.000		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			61.355.000				250.000.000		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	61.355.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	250.000.000		
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.318.200				10.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.318.200	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	10.000.000		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.175.000				350.465.000		
		Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	28.175.000			2	350.465.000		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-				37			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2				10			
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-				50.000.000		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	50.000.000		
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-				146.972.000		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	37	146.972.000		
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.175.000				153.493.000		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	28.175.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	153.493.000		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.104.416.033				1.821.270.000		
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.104.416.033			1	1.821.270.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1				1			
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			133.930.000				151.270.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	133.930.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	151.270.000		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			970.486.033				1.670.000.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	970.486.033	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	1.670.000.000		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.240.000				728.615.000		
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	140.240.000			2	728.615.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210				210			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diwajibkan Pajaknya (Unit)	1				1			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112				112			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-				2			
3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.690.000				40.915.000		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diwajibkan Pajaknya (Unit)	1	40.690.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	40.915.000		
3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			91.200.000				574.800.000		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	210	91.200.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	210	574.800.000		
3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.350.000				35.900.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	8.350.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	112	35.900.000		
3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-				62.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	62.000.000		
3.27.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-				15.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	15.000.000		
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			128.110.150				6.462.292.000		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	128.110.150			2	6.462.292.000	Dinas Pertanian	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5				0,5			
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1				3,1			
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5				1,5			
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22				59,22			
3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			70.000.000				4.477.292.000		
		Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	70.000.000			1	4.477.292.000		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-				1			
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-				6.000			
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-				6.000			
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-				30			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-				2			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-				5			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-				1			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	-				1			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	-				1			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (I laporan)	-				1			
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			70.000.000				2.812.462.000		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (I laporan)	1	70.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	2.812.462.000		
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			-				78.000.000		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	78.000.000		
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			-				100.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	100.000.000		
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			-				200.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan			-				287.665.000		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	287.665.000		
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			-				200.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			-				100.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6.000	100.000.000		
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			-				60.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6.000	60.000.000		
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan			-				200.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			-				404.165.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	404.165.000		
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura			-				35.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (I laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	35.000.000		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			28.110.150				150.000.000		
		Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	-	28.110.150			1	150.000.000		
				2				2			
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			28.110.150				100.000.000		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	28.110.150	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	100.000.000		
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			-				50.000.000		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah			-				30.000.000		
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (I laporan)	-	-			1	30.000.000		
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			-				30.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terawasnya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer							40.000.000		
		Terawasnya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-			1	40.000.000		
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-			1			
	3.27.02.2.04.0001	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan							30.000.000		
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan							10.000.000		
		Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	10.000.000		
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.069.000.000		
		Terkendali dan terawasnya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-			10.000	1.069.000.000		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-			1			
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-			1			
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan							75.000.000		
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10.000	75.000.000		
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak							30.000.000		
		Terawasnya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak							964.000.000		
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	964.000.000		
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							696.000.000		
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	30.000.000			15	696.000.000		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-				10			
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000				10.000			
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							100.000.000		
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	100.000.000		
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							396.000.000		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	396.000.000		
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							200.000.000		
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1450	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10.000	200.000.000		
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							12.700.000.000		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	22.746,1	970.967.800			22.746,1	12.700.000.000	Dinas Pertanian	
			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1				22.746,1			
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditindaklanjuti (Hektar)	500				500			
			Indeks Pertanaman (Angka)	1,85				1,85			
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian							2.120.000.000		
		Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800			1	2.120.000.000		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				1			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				2			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				1			
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				1			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				1			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-				1			
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-				1			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-				1			
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-				1			
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-				1			
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	-				22.832			
3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			670.967.800				120.000.000		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	670.967.800	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	120.000.000		
3.27.03.2.01.0005		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			-				50.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	22.832	50.000.000		
3.27.03.2.01.0006		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			-				450.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	450.000.000		
3.27.03.2.01.0007		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan			-				100.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	100.000.000		
3.27.03.2.01.0009		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan			-				200.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
3.27.03.2.01.0011		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			-				200.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
3.27.03.2.01.0012		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			-				200.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
3.27.03.2.01.0013		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			-				200.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
3.27.03.2.01.0014		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota			-				50.000.000		
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
3.27.03.2.01.0015		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota			-				200.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota			-				300.000.000		
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	300.000.000		
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			-				50.000.000		
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			300.000.000				10.450.000.000		
		Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	300.000.000			1	10.450.000.000		
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-				1			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				-			
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				5			
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	-				1			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2				20			
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				2			
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				2			
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				1			
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1				10			
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			-				400.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	400.000.000		
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			100.000.000				1.000.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	1.000.000.000		
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			-				400.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	400.000.000		
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			-				50.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	50.000.000		
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			-				200.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			-				0		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	-	0		
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			200.000.000				2.000.000.000		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	20	2.000.000.000		
	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			-				200.000.000		
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.03.2.02.0014		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas			-				200.000.000		
		Terbangun, terpeliharaan dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
3.27.03.2.02.0015		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			-				6.000.000.000		
		Terbangun, terpeliharaan dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	6.000.000.000		
3.27.03.2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			-				130.000.000		
		Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-			1	130.000.000		
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-				1			
3.27.03.2.03.0001		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			-				100.000.000		
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	100.000.000		
3.27.03.2.03.0002		Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			-				30.000.000		
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							1.247.000.000		
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	24.469.910			100	1.247.000.000	Dinas Pertanian	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100				100			
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69				3,69			
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57				28,57			
3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah							462.000.000		
		Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	24.469.910			1	462.000.000		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-				15			
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-				15			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1				1			
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-				1			
			Jumlah kader zoonosis (Orang)	-				42			
3.27.04.2.01.0003		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			-				45.000.000		
		Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	45.000.000		
3.27.04.2.01.0004		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis			-				42.000.000		
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	42	42.000.000		
3.27.04.2.01.0005		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			-				45.000.000		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	45.000.000		
3.27.04.2.01.0006		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			-				30.000.000		
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
3.27.04.2.01.0007		Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis			-				50.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			24.469.910				250.000.000		
		Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	24.469.910	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	250.000.000		
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah			-				120.000.000		
		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	-	-			1	120.000.000		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	-	-			1			
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-			1			
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-			1			
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			-				30.000.000		
		Terawasi penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			-				30.000.000		
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			-				30.000.000		
		Terawasi dan terpeiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya			-				30.000.000		
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota			-				350.000.000		
		Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-			1	350.000.000		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-	-			1			
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			-				175.000.000		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	175.000.000		
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			-				175.000.000		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	175.000.000		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			-				315.000.000		
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	-			1	315.000.000		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-			100			
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-	-			1			
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-			2			
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-			1			
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-	-			50			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-				30			
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	-				5			
3.27.04.2.04.0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			-				75.000.000		
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	75.000.000		
3.27.04.2.04.0004		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			-				75.000.000		
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	75.000.000		
3.27.04.2.04.0005		Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			-				15.000.000		
		Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	15.000.000		
3.27.04.2.04.0006		Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit			-				20.000.000		
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	20.000.000		
3.27.04.2.04.0007		Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan			-				30.000.000		
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	30.000.000		
3.27.04.2.04.0008		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan			-				75.000.000		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	100	75.000.000		
3.27.04.2.04.0009		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan			-				10.000.000		
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	10.000.000		
3.27.04.2.04.0010		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			-				15.000.000		
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	15.000.000		
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			-				267.693.000		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	-	-			100	267.693.000	Dinas Pertanian	
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	-			100			
3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			-				267.693.000		
		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	-	-			1	267.693.000		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	-			50			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-			5.000			
3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			-				153.193.000		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5.000	153.193.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			-				50.000.000		
		Tertangannya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	50.000.000		
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			-				64.500.000		
		Tertangulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	64.500.000		
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			33.296.226				97.750.000		
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	33.296.226			100	97.750.000	Dinas Pertanian	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			33.296.226				49.250.000		
		Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	33.296.226			1	49.250.000		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-				2			
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-				9			
			Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141				141			
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			-				5.000.000		
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	5.000.000		
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			-				11.250.000		
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	9	11.250.000		
	3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak			-				3.000.000		
		terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	3.000.000		
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			33.296.226				30.000.000		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	33.296.226	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	141	30.000.000		
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			-				36.000.000		
		Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-			5	36.000.000		
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-				30			
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-				10			
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-				0			
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	-				10			
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			-				7.500.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	7.500.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan			-				7.500.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	7.500.000		
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan			-				13.500.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	13.500.000		
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan			-				0		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	-	0		
	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner atau Pasar Hewan			-				7.500.000		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	7.500.000		
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			-				12.500.000		
		Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-			15	12.500.000		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-	-			2			
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			-				5.000.000		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	5.000.000		
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			-				7.500.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	7.500.000		
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							4.221.000.000		
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20,78	534.263.218			20,78	4.221.000.000	Dinas Pertanian	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80				80			
			Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100				100			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							4.221.000.000		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan	-	534.263.218			1	4.221.000.000		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-				5			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-				11			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-				78			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-				50			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459				1.459			
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-				15			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15				15			
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			431.562.200				1.091.000.000		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	431.562.200	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	1.091.000.000		
	3.27.07.2.01.0001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			102.701.018				1.675.000.000		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459	102.701.018	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1.459	1.675.000.000		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							318.000.000		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	78	318.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			-				550.000.000		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	11	550.000.000		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			-				152.000.000		
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	152.000.000		
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota			-				375.000.000		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	375.000.000		
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			-				30.000.000		
		Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	30.000.000		
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			-				30.000.000		
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didiseminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	-	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	30.000.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perubahan Renja Tahun 2025

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Perubahan Renja ini disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Renja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana/ Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pertanian tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Tabel TC. 27) sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T.C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				(19)	(20)
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah - Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	0,5	19.867.774.344	0,5	44.673.250.695	0,5	40.786.684.000	0,5	43.003.106.000	0,5	45.107.988.000	0,5	48.281.680.000	241.700.483.036		(21)	(22)	
					18.176.667.037	19.677.515.695	20.666.106.000	21.622.924.000	22.631.557.000	23.695.003.000	126.469.772.732										
		3.27.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP Berasakad D. Daerah (%) Peningkatan Kinerja Bidang/Sekretariat yang Diusai (%) Jumlah Inovasi (Inovasi)	0,65	18.176.667.037	0,5	19.677.515.695	0,5	20.666.106.000	0,5	21.622.924.000	0,5	22.631.557.000	0,5	23.695.003.000	126.469.772.732	3.27.01.000.00	01.0000 - DINAS PERTANIAN		
					85,66	91	91	92	94	95	42	834.833.200									
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	370.849.200	4	76.000.000	4	83.600.000	4	91.960.000	4	101.156.000	111.268.000	834.833.200					
			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	370.849.200	19	76.000.000	19	83.600.000	19	91.960.000	19	101.156.000	111.268.000	834.833.200					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		6		6		6		7						
				Jumlah Dokumen Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0		1						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1						
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		0		0		0		0		1						
				Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		0		0		0		0		1						
		3.27.01.2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	16.598.750	6	15.000.000	6	16.500.000	6	18.150.000	6	19.985.000	21.961.000	108.174.750					
			Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	16.598.750	6	15.000.000	6	16.500.000	6	18.150.000	6	19.985.000	21.961.000	108.174.750					
		3.27.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6.664.000	6	7.000.000	6	7.700.000	6	8.470.000	6	9.317.000	10.248.000	49.399.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Peningjung-jawab	Lokasi						
						2025			2026			2027			2028					2029			2030		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000		49.399.000					
		3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.664.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000		49.399.000					
		3.27.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4.894.950		5.000.000				5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.000		35.419.950					
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4.894.950	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.050.000	4	6.655.000	4	7.320.000	4	35.419.950					
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	336.027.500	19	20.000.000	19	20.000.000	19	22.000.000	19	24.200.000	19	26.620.000	19	29.282.000	19	458.129.500					
		3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa (Data)	0	0	0	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000					
		3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	7.000.000	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000	1	42.735.000					
		3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.000	1	30.525.000					
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	178	16.017.029.695	146	16.145.165.695	146	16.145.165.695	144	16.952.633.000	140	17.800.496.000	131	18.690.774.000	127	19.625.593.000	127	105.594.485.640					
			Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	13	16.379.823.945	13	16.145.165.695	13	16.145.165.695	13	16.952.633.000	13	17.800.496.000	13	18.690.774.000	13	19.625.593.000	13	105.594.485.640					
		3.27.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	16.017.029.695	146	16.016.405.695	146	16.016.405.695	144	16.817.225.000	140	17.658.087.000	131	18.540.991.000	127	19.468.041.000	127	104.517.779.390					
		3.27.01.2.02.0002	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	178	16.017.029.695	146	16.016.405.695	146	16.016.405.695	144	16.817.225.000	140	17.658.087.000	131	18.540.991.000	127	19.468.041.000	127	104.517.779.390					
						358.676.000	124.560.000		130.788.000				137.327.000		144.183.000		151.403.000		1.046.947.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Pung-jawab	Lokasi																
						2025			2026			2027			2028					2029			2030												
						Target	Rp.	(7)	Target	Rp.	(10)	Target	Rp.	(11)	Target	Rp.	(12)			Target	Rp.	(13)	Target	Rp.	(14)	Target	Rp.	(15)	Target	Rp.	(16)	Target	Rp.	(17)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)														
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	5.663.552	3	11.000.000	3	12.100.000	3	13.310.000	3	14.641.000	3	16.105.000		72.819.552																
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	5.663.552	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	16.105.000		72.819.552																
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	34.952.680		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		759.952.680																
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	34.952.680	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		759.952.680																
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.260.340		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.985.000		21.961.000		97.836.340																
			Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.260.340	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.985.000	1	21.961.000		97.836.340																
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.940.000	3	6.534.000	3	7.187.000	3	7.906.000		38.367.000																
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.940.000	3	6.534.000	3	7.187.000	3	7.906.000		38.367.000																
		3.27.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.300.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.985.000	12	21.961.000		94.876.000																
			Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan (Paket)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.300.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.985.000	12	21.961.000		94.876.000																
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	61.355.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		1.587.630.000																
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	61.355.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000		1.587.630.000																
		3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Daerah Peningjang Urusan Penerimaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.318.200	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		64.369.200																
			Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis Daerah Peningjang Urusan Penerimaan pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.318.200	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		64.369.200																
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningjang Urusan Penerimaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	28.175.000	2	350.465.000	2	314.109.000	2	329.815.000	2	346.305.000	2	363.621.000		1.732.490.000																
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	28.175.000	2	350.465.000	2	314.109.000	2	329.815.000	2	346.305.000	2	363.621.000		1.732.490.000																
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		37		37		8		8																					
			Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		8		8																									
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	55.125.000	2	57.881.000	2	60.775.000		276.281.000																
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	55.125.000	2	57.881.000	2	60.775.000		276.281.000																
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	146.972.000	37	154.320.000	37	154.320.000	37	162.036.000	33	170.138.000	33	178.645.000		812.111.000																
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	146.972.000	37	154.320.000	37	154.320.000	33	162.036.000	33	170.138.000	33	178.645.000		812.111.000																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
						2025			2026			2027			2028					2029			2030		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan (Unit)	1	2	28.175.000	153.493.000	153.493.000	107.289.000	112.654.000	112.654.000	112.654.000	118.286.000	118.286.000	8	124.201.000	124.201.000	644.098.000	644.098.000					
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan (Unit)	1	1	1.104.416.033	1.821.270.000	1.821.270.000	1.836.276.000	1.852.151.000	1.852.151.000	1.852.151.000	1.868.951.000	1.868.951.000	1	1.866.736.000	1.866.736.000	10.369.800.033	10.369.800.033					
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan (Laporan)	1	1	133.930.000	151.270.000	151.270.000	159.026.000	167.189.000	167.189.000	167.189.000	175.781.000	175.781.000	1	184.826.000	184.826.000	972.022.000	972.022.000					
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan (Laporan)	1	1	970.486.033	1.670.000.000	1.670.000.000	1.677.250.000	1.684.962.000	1.684.962.000	1.684.962.000	1.693.170.000	1.693.170.000	1	1.701.910.000	1.701.910.000	9.397.775.033	9.397.775.033					
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	140.240.000	728.815.000	728.815.000	887.388.000	916.692.000	916.692.000	916.692.000	948.881.000	948.881.000	2	984.248.000	984.248.000	4.606.064.000	4.606.064.000					
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	140.240.000	728.815.000	728.815.000	887.388.000	916.692.000	916.692.000	916.692.000	948.881.000	948.881.000	2	984.248.000	984.248.000	4.606.064.000	4.606.064.000					
		3.27.01.2.09.0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	40.690.000	40.915.000	40.915.000	41.173.000	41.471.000	41.471.000	41.471.000	41.813.000	41.813.000	1	42.207.000	42.207.000	248.266.000	248.266.000					
		3.27.01.2.09.0006	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	40.690.000	40.915.000	40.915.000	41.173.000	41.471.000	41.471.000	41.471.000	41.813.000	41.813.000	1	42.207.000	42.207.000	248.266.000	248.266.000					
		3.27.01.2.09.0009	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	91.200.000	574.900.000	574.900.000	576.520.000	582.642.000	582.642.000	582.642.000	587.210.000	587.210.000	2	592.275.000	592.275.000	3.006.647.000	3.006.647.000					
		3.27.01.2.09.0009	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	210	91.200.000	574.900.000	574.900.000	576.520.000	582.642.000	582.642.000	582.642.000	587.210.000	587.210.000	210	592.275.000	592.275.000	3.006.647.000	3.006.647.000					
		3.27.01.2.09.0009	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	112	8.350.000	35.900.000	35.900.000	37.695.000	39.579.000	39.579.000	39.579.000	41.568.000	41.568.000	112	43.636.000	43.636.000	206.718.000	206.718.000					
		3.27.01.2.09.0009	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	62.000.000	62.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	242.000.000	242.000.000	2	266.200.000	266.200.000	990.200.000	990.200.000					
		3.27.01.2.09.0009	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	62.000.000	62.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	242.000.000	242.000.000	2	266.200.000	266.200.000	990.200.000	990.200.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi							
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laboran)	1	0	78.000.000	0	78.000.000	0	85.800.000	0	94.380.000	0	103.818.000	0	114.199.000	0	114.199.000	0	114.199.000	0	114.199.000	0	476.197.000	
		3.27.02.2.01.0003	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Tan)	0	0	78.000.000	2	78.000.000	2	85.800.000	2	94.380.000	2	103.818.000	2	114.199.000	2	114.199.000	2	114.199.000	2	114.199.000	2	476.197.000	
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Tan)	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	110.000.000	0	121.000.000	0	133.100.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	610.510.000	
		3.27.02.2.01.0005	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Tan)	0	0	100.000.000	30	100.000.000	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000	30	146.410.000	30	146.410.000	30	146.410.000	30	610.510.000	
		3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laboran)	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	220.000.000	0	242.000.000	0	266.200.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0006	Terawasanya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laboran)	0	0	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen (Laboran)	0	0	287.865.000	0	287.865.000	0	316.431.000	0	348.074.000	0	382.882.000	0	421.170.000	0	421.170.000	0	421.170.000	0	421.170.000	0	1.756.222.000	
		3.27.02.2.01.0007	Terawasanya penggunaan sarana pascapanen	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen (Laboran)	0	0	287.865.000	1	287.865.000	1	316.431.000	1	348.074.000	1	382.882.000	1	421.170.000	1	421.170.000	1	421.170.000	1	421.170.000	1	1.756.222.000	
		3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laboran)	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	220.000.000	0	242.000.000	0	266.200.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0008	Terawasanya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laboran)	0	0	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batano)	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	110.000.000	0	121.000.000	0	133.100.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	146.410.000	0	610.510.000	
		3.27.02.2.01.0008	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batano)	0	0	100.000.000	6.000	100.000.000	6.000	110.000.000	6.000	121.000.000	6.000	133.100.000	6.000	146.410.000	6.000	146.410.000	6.000	146.410.000	6.000	146.410.000	6.000	610.510.000	
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batano)	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	66.000.000	0	72.600.000	0	79.860.000	0	87.846.000	0	87.846.000	0	87.846.000	0	87.846.000	0	368.306.000	
		3.27.02.2.01.0009	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batano)	0	0	60.000.000	6.000	60.000.000	6.000	66.000.000	6.000	72.600.000	6.000	79.860.000	6.000	87.846.000	6.000	87.846.000	6.000	87.846.000	6.000	87.846.000	6.000	368.306.000	
		3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan (Laboran)	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	220.000.000	0	242.000.000	0	266.200.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	292.820.000	0	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0012	Terawasanya penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan (Laboran)	0	0	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	292.820.000	1	1.221.020.000	
		3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laboran)	0	0	404.165.000	0	404.165.000	0	444.581.000	0	489.039.000	0	537.943.000	0	591.737.000	0	591.737.000	0	591.737.000	0	591.737.000	0	2.467.465.000	
		3.27.02.2.01.0014	Terawasanya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laboran)	0	0	404.165.000	1	404.165.000	1	444.581.000	1	489.039.000	1	537.943.000	1	591.737.000	1	591.737.000	1	591.737.000	1	591.737.000	1	2.467.465.000	
		3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laboran)	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	38.500.000	0	42.350.000	0	46.585.000	0	51.243.000	0	51.243.000	0	51.243.000	0	51.243.000	0	213.678.000	
		3.27.02.2.01.0016	Terawasanya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laboran)	0	0	35.000.000	5	35.000.000	5	38.500.000	5	42.350.000	5	46.585.000	5	51.243.000	5	51.243.000	5	51.243.000	5	51.243.000	5	213.678.000	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanangsan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemuliaan (Varietas Unggul Baru (VUB))	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	28.110.150	0	943.875.150	
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Keturunan dan Kestabilan SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemuliaan (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	638.820.150	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awaal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Peninggung-jawab	Lokasi						
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
					2	28.110.150	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	146.410.000	2	638.620.150	
		3.27.02.2.02.0005	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman penunjang (Varietas Unggul Baku (VUB)).	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan penunjang (Varietas Unggul Baku (VUB)).	0	0	0	50.000.000	0	55.000.000	0	60.500.000	0	66.550.000	0	73.205.000	0	73.205.000	0	73.205.000	0	73.205.000	0	305.255.000	
		3.27.02.2.03	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit Ternak dan Ternakan Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Tersebut.	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan penunjang (Laporan).	0	0	0	30.000.000	0	31.500.000	0	33.075.000	0	34.728.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	165.766.000	
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak yang Beredar (Laporan).	0	0	0	30.000.000	0	31.500.000	0	33.075.000	0	34.728.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	165.766.000	
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengantar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak yang Beredar (Laporan).	0	0	0	40.000.000	0	42.000.000	0	44.100.000	0	46.304.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	221.024.000	
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Keaslian dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan).	0	0	0	40.000.000	0	42.000.000	0	44.100.000	0	46.304.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	48.620.000	0	221.024.000	
		3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Keaslian dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan).	0	0	0	10.000.000	0	10.500.000	0	11.025.000	0	11.576.000	0	12.155.000	0	12.155.000	0	12.155.000	0	12.155.000	0	55.256.000	
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan).	0	0	0	1.069.000.000	0	1.170.650.000	0	1.282.202.000	0	1.404.633.000	0	1.539.019.000	0	1.539.019.000	0	1.539.019.000	0	1.539.019.000	0	6.465.504.000	
		3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan).	0	0	0	75.000.000	0	78.750.000	0	82.687.000	0	86.821.000	0	91.162.000	0	91.162.000	0	91.162.000	0	91.162.000	0	414.420.000	
		3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan).	0	0	0	30.000.000	0	31.500.000	0	33.075.000	0	34.728.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	36.465.000	0	165.766.000	
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan).	0	0	0	964.000.000	0	1.060.400.000	0	1.166.440.000	0	1.283.084.000	0	1.411.392.000	0	1.411.392.000	0	1.411.392.000	0	1.411.392.000	0	5.885.316.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		3.27.03.2.01.0015	Ditelakannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kota	Pendataan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumentasi)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000			
		3.27.03.2.01.0016	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Kota	0	0	0	0	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000				
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang dikalaf (Dokumentasi)	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000				
		3.27.03.2.01.0018	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Dokumentasi)	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000				
		3.27.03.2.01.0019	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumentasi)	0	0	0	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000				
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	1	10.460.000.000	1	5.155.000.000	1	4.680.500.000	1	4.680.500.000	1	4.673.205.000	1	29.905.255.000				
				Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0	1		1		1		1		1							
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	0		0		0		0		0							
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	5		5		5		5		5							
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0	0	1		1		1		1		1							
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	2	20	20		20		20		20		20							
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	2		2		2		2		2							
				Jumlah DAM Pant yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	2		2		2		2		2							
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	1	1		1		1		1		1							
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	1	10	10		10		10		10		10							
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	2	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000				
			Pertanian		0	0	0	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	2.000.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		3.27.03.2.03.0002	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarkan dan Dinafikan (Laboran)	0	100.000.000	0	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	1	165.765.000	610.510.000				
		3.27.03.2.03.0002	Terlaksananya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0	30.000.000	0	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.725.000	1	36.465.000	1	165.765.000					
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		24.469.910	1.247.000.000	24.469.910	1.247.000.000		1.344.200.000	1.449.744.000	1.564.395.000	1.689.000.000	1.801.051.000	1.926.525.000	2.052.000.000	2.177.500.000	2.302.975.000	2.428.450.000	2.553.925.000	2.679.400.000	2.804.875.000	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular Strategis (PHMS) (%) Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	1.247.000.000	100	1.247.000.000	100	1.344.200.000	100	1.449.744.000	100	1.564.395.000	100	1.689.000.000	100	1.801.051.000	100	1.926.525.000	100	2.052.000.000	2.177.500.000
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	462.000.000	0	462.000.000	1	504.200.000	1	550.420.000	1	601.051.000	1	656.525.000	1	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laboran)	15	462.000.000	15	462.000.000	15	504.200.000	15	550.420.000	15	601.051.000	15	656.525.000	15	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	462.000.000	0	462.000.000	15	504.200.000	15	550.420.000	15	601.051.000	15	656.525.000	15	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Kasus)	1	462.000.000	1	462.000.000	1	504.200.000	1	550.420.000	1	601.051.000	1	656.525.000	1	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	462.000.000	1	462.000.000	1	504.200.000	1	550.420.000	1	601.051.000	1	656.525.000	1	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01	Manajemen risiko zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	462.000.000	0	462.000.000	42	504.200.000	35	550.420.000	35	601.051.000	35	656.525.000	35	707.550.000	731.806.910	782.831.810	833.856.720	884.881.630	
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	0	45.000.000	0	45.000.000	0	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.340.000	70.785.000	76.230.000	81.675.000	87.120.000	92.565.000	98.010.000	103.455.000	108.900.000	114.345.000	
		3.27.04.2.01.0004	Terlengkapinya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Masyarakat dalam Penanggulangan Zoonosis	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laboran)	15	45.000.000	15	45.000.000	15	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.340.000	70.785.000	76.230.000	81.675.000	87.120.000	92.565.000	98.010.000	103.455.000	108.900.000	114.345.000	
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	45.000.000	0	45.000.000	42	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.340.000	70.785.000	76.230.000	81.675.000	87.120.000	92.565.000	98.010.000	103.455.000	108.900.000	114.345.000	
		3.27.04.2.01.0006	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	45.000.000	0	45.000.000	15	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.340.000	70.785.000	76.230.000	81.675.000	87.120.000	92.565.000	98.010.000	103.455.000	108.900.000	114.345.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awaal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penang gung-jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Terlaksananya Penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang dirindukan/diikuti dengan penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	0	0	30.000.000	31.500.000	1	1	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000	1	165.768.000		
		3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan risiko zoonosis sesuai dengan siklus zoonosis daerah	0	0	50.000.000	52.500.000	0	1	1	1	55.125.000	1	57.881.000	1	60.775.000	1	276.281.000		
		3.27.04.2.01.0008	Pencapaian Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laboran)	1	1	24.469.910	24.469.910	1	1	1	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1	1.550.744.910		
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Jumlah pengawasan pererapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laboran)	0	0	120.000.000	125.000.000	0	1	1	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.000	1	663.075.000		
			Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan pererapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laboran)	0	0	120.000.000	125.000.000	0	1	1	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.000	1	663.075.000		
			Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan pererapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laboran)	0	0	120.000.000	125.000.000	0	1	1	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.000	1	663.075.000		
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM) (Laboran)	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
			Terlaksananya Pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
		3.27.04.2.02.0005	Terlaksananya pengawasan peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
		3.27.04.2.02.0006	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
		3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laboran)	0	0	30.000.000	31.500.000	0	1	1	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	165.768.750		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laboran)	0	0	350.000.000	367.500.000	0	1	1	1	385.874.000	1	405.164.000	1	425.426.000	1	1.933.964.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		3.27.04.2.03.0001	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	0	-	1	350.000.000	1	367.500.000	1	385.874.000	1	405.164.000	1	425.426.000	1	1.933.964.000				
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0	0	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.000	1	202.580.000	1	212.713.000	1	966.980.000	#VALUE!			
		3.27.04.2.04	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0	0	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.000	1	202.584.000	1	212.713.000	1	966.984.000				
		3.27.04.2.04	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	0	-	1	315.000.000	1	346.500.000	1	381.150.000	1	419.285.000	1	461.189.000	1	1.923.104.000				
			Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	0	-	1	315.000.000	100	346.500.000	100	381.150.000	100	419.285.000	1	461.189.000	1	1.923.104.000				
				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan terpadu kesmavet dan kesehatan hewan (Laporan)	0	0	0	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.000	1	202.584.000	1	212.713.000	1	966.984.000				
				Jumlah produk hewan segar berkeamanan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	0	1	175.000.000	2	183.750.000	2	192.937.000	2	202.584.000	2	212.713.000	2	966.984.000				
				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKK/HSK/HEM (Dokumen)	0	0	0	50	75.000.000	50	82.500.000	50	90.750.000	50	99.825.000	50	109.807.000	50	457.882.000				
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	0	30	75.000.000	30	82.500.000	30	90.750.000	30	99.825.000	30	109.807.000	30	457.882.000				
				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0	0	5	75.000.000	5	82.500.000	5	90.750.000	5	99.825.000	5	109.807.000	5	457.882.000				
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	0	0	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.000	1	457.882.000				
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0	0	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.000	1	457.882.000				
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	0	0	0	5	15.000.000	5	16.500.000	5	18.150.000	5	19.985.000	5	21.961.000	5	91.576.000				
		3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan, Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKK/HSK/HEM, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	0	0	0	20.000.000	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.082.000	35.022.000	38.112.000	41.352.000	44.752.000	48.302.000	52.002.000	55.852.000	59.852.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Terkecilaaya Penerbitan Rekomendasi Pemakaian Serifikat Veteriner dan SKKH/SKPH/HPM (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi Pemakaian dan Pengeluaran, Serifikat Veteriner dan SKKH/SKPH/HPM (Dokumen)	0	0	20.000.000	50	22.000.000	50	33.000.000	50	24.200.000	50	26.620.000	50	29.282.000	50	122.102.000				
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan masyarakat		0	0	30.000.000		33.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		183.153.000				
		3.27.04.2.04.0008	Teraksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orphan)	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orphan)	0	0	30.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	2	183.153.000				
		3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan		0	0	75.000.000		82.500.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.000		457.882.000				
		3.27.04.2.04.0009	Teraksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orphan)	0	0	75.000.000	100	82.500.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.000	100	457.882.000				
		3.27.04.2.04.0010	Pembinaan dan pendampingan Penerimaan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berdasarkan		0	0	10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		61.051.000				
		3.27.04.2.04.0010	Teraksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Penerimaan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berdasarkan	Jumlah produk hewan segar berkemampuan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000				
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	15.000.000		16.500.000		16.500.000		18.150.000		19.985.000		21.961.000		91.576.000				
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				267.693.000		294.463.000		294.463.000		323.909.000		356.300.000		391.930.000		1.634.295.000				
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	0	267.693.000	100	294.463.000	100	294.463.000	100	323.909.000	100	356.300.000	100	391.930.000	100	1.634.295.000	3.270.000.000 - 01.000000 -			
				Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Parsutase)	100	0	267.693.000	100	294.463.000	100	294.463.000	100	323.909.000	100	356.300.000	100	391.930.000	100	1.634.295.000				
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		0	0	267.693.000	1	294.463.000	1	294.463.000	1	323.909.000	1	356.300.000	1	391.930.000	1	1.634.295.000				
			Teraksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Labozan)	0	0	267.693.000	50	294.463.000	50	294.463.000	50	323.909.000	50	356.300.000	50	391.930.000	50	1.634.295.000				
				Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Diintervensi (Ha)	7.619	0	267.693.000	5.000	294.463.000	5.000	294.463.000	5.000	323.909.000	5.000	356.300.000	5.000	391.930.000	5.000	1.634.295.000				
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		0	0	153.193.000		171.013.000		171.013.000		190.739.000		212.571.000		237.496.000		965.012.000				
			Terdiendainya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0	153.193.000	5.000	171.013.000	5.000	171.013.000	5.000	190.739.000	5.000	212.571.000	5.000	237.496.000	5.000	965.012.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir	Unit Kerja Daerah Peninggung-jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan yang Diakibatkan (Lihat)	0	0	0	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.880.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	275.505.000		
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	Jumlah penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perikanan (Laporan)	0	0	0	64.500.000	70.950.000	78.045.000	85.849.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	84.434.000	393.775.000		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	100	33.296.226	97.750.000	112.525.000	123.777.000	129.497.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	142.446.000	639.291.226		
		3.27.06.2.01	Meningkatnya kualitas dan kemandirian perizinan usaha yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	33.296.226	49.250.000	54.175.000	59.592.000	58.896.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	319.995.226		
				Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Lihat)	0	0	33.296.226	49.250.000	54.175.000	59.592.000	58.896.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	64.786.000	319.995.226		
		3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.550.000		
				Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.550.000		
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	11.250.000	12.375.000	13.612.000	14.973.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	68.681.000		
				Teraksennanya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	11.250.000	12.375.000	13.612.000	14.973.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	16.471.000	68.681.000		
		3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi unit usaha pembibitan/budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Lihat)	0	0	0	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.983.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	18.315.000		
				Teraksennanya sertifikasi pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Lihat)	0	0	0	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.983.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	18.315.000		
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	121	141	33.296.226	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	216.449.226		
				Terbina dan terawasnya penerapan standar dan izin usaha pertanian (Laporan)	121	141	33.296.226	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	216.449.226		
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	-	36.000.000	44.600.000	49.060.000	53.964.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	242.984.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
					2025		2026		2027		2028		2029				2030		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Perencanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0	0		5	38.000.000	5	44.600.000	5	49.060.000	5	53.984.000	5	59.360.000		242.984.000		
			Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		30		30		30		30		30					
			Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laboran)	0	0		10		10		10		10		10					
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0		1		1		1		1					
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laboran)	0	0		10		10		10		10		10					
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Pemeliharaan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terbitnya Penatausahaan Perencanaan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0	0		5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	9.982.000	5	10.960.000		45.787.000		
			Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Perencanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0	0		5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	9.982.000	5	10.960.000		45.787.000		
			Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		10		10		10		10		10					
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0		0		0		0		0					
		3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan	0	0		0	7.500.000	0	8.250.000	0	9.075.000	0	9.982.000	0	10.960.000		45.787.000		
			Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laboran)	0	0		10	7.500.000	10	8.250.000	10	9.075.000	10	9.982.000	10	10.960.000		45.787.000		
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0	13.500.000	0	14.850.000	0	16.335.000	0	17.968.000	0	19.765.000		82.416.000		
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		30	13.500.000	30	14.850.000	30	16.335.000	30	17.968.000	30	19.765.000		82.416.000		
			Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.500.000	0	6.050.000	0	6.655.000		23.205.000		
			Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000		23.205.000		
			Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0	7.500.000	0	8.250.000	0	9.075.000	0	9.982.000	0	10.980.000		45.787.000		
			Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	0	0		10	7.500.000	10	8.250.000	10	9.075.000	10	9.982.000	10	10.980.000		45.787.000		
			Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	0	0		0	12.500.000	0	13.750.000	0	15.125.000	0	16.637.000	0	18.300.000		76.312.000		
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	0	0		15	12.500.000	15	13.750.000	15	15.125.000	15	16.637.000	15	18.300.000		76.312.000		
			Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laboran)	0	0		2		2		2		2		2			#VALUE!		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabasaskota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	38	0	0	11	550.000.000	11	605.000.000	11	665.500.000	11	732.050.000	11	805.255.000	11	805.255.000	3.357.805.000		
		3.27.07.2.01.0006	Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan difungsikan kapasitasnya (Orang)	0	0	0	50	152.000.000	50	167.200.000	50	183.920.000	50	202.312.000	50	222.543.000	50	222.543.000	927.975.000		
		3.27.07.2.01.0007	Penguatan kelembagaan penyuluh pertanian di Tingkat Kabupaten	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat Kabupaten yang difungsikan kapasitasnya (Unit)	0	0	0	15	375.000.000	15	382.500.000	15	390.750.000	15	399.825.000	15	409.807.000	15	409.807.000	1.957.882.000		
		3.27.07.2.01.0008	Perbaikan kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat Kabupaten	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat Kabupaten yang difungsikan kapasitasnya (Unit)	0	0	0	5	30.000.000	5	33.000.000	5	36.300.000	5	39.930.000	5	43.923.000	5	43.923.000	183.155.000		
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1	43.923.000	183.155.000		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. Hantaman yang luar biasa terhadap sektor ekonomi saat ini butuh penanganan yang insidental dan hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada adalah optimalisasi dari belanja pemerintah karena 3 (tiga) indikator lainnya; investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor impor terus melambat dan tumbuh negatif sampai saat ini. Artinya optimalisasi belanja pemerintah adalah harapan terbesar agar aktivitas ekonomi terus berjalan. Kegiatan-kegiatan strategis yang distimuluskan dalam Renja ini merupakan salah satu optimalisasi belanja pemerintah dimaksud dan semoga angka-angka ini dapat bertahan dan terealisasi kedepannya.

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan/indikator kinerja dan pagu indikatif untuk perubahan Renja Dinas Pertanian tahun 2025 masih menitikberatkan pada peningkatan produksi pertanian dari aspek ketersediaan benih/bibit bersertifikat, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian (pra panen, panen dan pasca panen), sumber-sumber air irigasi

dan peningkatan SDM penyuluh pertanian lapangan, medik veteriner, para medik veteriner, kelompok tani dan petani sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029 dan usulan masyarakat.

Namun demikian apabila ternyata didalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak cukup Dinas Pertanian akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Demikian perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini kami susun dengan harapan dapat diwujudkan melalui dokumen-dokumen penganggaran selanjutnya. Terimakasih.